KR GROUP
http://www.krjogja.com

Kedaulatan Rakyat

Suara Hati Nurani Rakyat

Terbit Sejak 27 September 1945

EPAPER www.kr.co.id

BERLANGGANAN SCAN BARCODE

JUMAT PAHING | 21 MARET 2025 (21 PASA 1958 / TAHUN LXXX NO 171) | HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN

Di Tengah Gelombang Penolakan

DPR Setujui RUU TNI Menjadi UU

JAKARTA (KR) - Di tengah arus penolakan melalui aksi demonstrasi dari elemen mahasiswa dan gabungan beberapa aliansi masyarakat yang mengepung gedung DPR RI, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) disetujui menjadi undang-undang telah memenuhi semua asas legalitas.

Di depan Gedung DPR, Kamis (20/3), massa aksi terus berorasi untuk menolak revisi UU TNI dan sejumlah permasalahan publik lainnya. Massa berasal dari berbagai universitas yang berada di sekitar Jakarta. Mereka mengenakan almamater dari universitas masing-masing. Mereka juga membentangkan sejumlah poster dan spanduk terkait penolakan RUU TNI yang kini sudah disetujui dan kemarin disahkan DPR RI.

Selain itu, ada juga yang menuliskan penolakannya di pagar DPR RI menggunakan cat semprot. Mereka terus menyuarakan kegelisahannya dengan silih berganti menyampaikan orasinya.

KR-Antara/Fakhri Hermansyah

UNJUKRASA UU TNI: Pengunjukrasa menarik tali untuk merobohkan pagar saat aksi terkait revisi UU TNI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rasa syukur, karena selesai memimpin Rapat Paripurna DPR mengesahkan UU TNI. Ia menilai, fokus pembahasannya sudah memenuhi semua asas legalitas yang memang harus dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang menyetujui RUU TNI untuk disahkan menjadi UU. Puan menyebut, RUU TNI yang disetujui dalam Rapat Paripurna untuk menjadi UU sudah melalui mekanisme pembentukan undang-undang.

"Dari penerimaan surat, sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain sebagainya, bahkan pembahasannya dilaksanakan secara terbuka," ujarnya.

Ia juga menyatakan, dalam pembahasan RUU TNI yang bergulir di parlemen telah mengakomodasi aspirasi masyarakat sipil. "Kami dari DPR dan pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting dan perlu, tentu saja juga masukan dari mahasiswa, perwakilan mahasiswa, juga sudah kami dengarkan," tegas Puan.

Untuk itu terkait sejumlah aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat sipil terhadap RUU TNI, ia mengatakan, RUU TNI

* Bersambung hal 7 kol 5

TIMNAS INDONESIA DIBANTAI AUSTRALIA

Peluang Lolos Piala Dunia Semakin Berat

SYDNEY (KR) - Hasil buruk harus didapat Tim Nasional (Timnas) Indonesia usai dibantai Timnas Australia dengan skor 1-5 pada laga *matchday* ketujuh Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Kekalahan dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium, Australia, Kamis (20/3) ini membuat peluang skuad 'Garuda' untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin berat terwujud.

Kegagalan menambah poin di *matchday* ketujuh ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-5 klasemen sementara Grup C dengan nilai 6, sedangkan Australia semakin nyaman di peringkat kedua klasemen sementara dengan 10 poin. Dengan tinggal memiliki tiga laga sisa kontra Bahrain pada 25 Maret, China pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni, peluang tim besutan pelatih Patrick Kluivert semakin menipis.

Tampil dengan pelatih anyar dan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi anyar, Timnas Indonesia sejatinya mampu tampil menggigit di menit-menit awal. Empat menit laga baru berjalan, Jay Idzes hampir mencetak

* Bersambung hal 7 kol 1

KORUPSI TATA KELOLA MINYAK MENTAH

Kejagung Periksa 147 Saksi

JAKARTA (KR) - Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 147 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Penyidik juga telah memeriksa dua orang ahli dan sembilan orang tersangka dalam kasus korupsi ini.

"Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 147 orang saksi dari berbagai pihak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (20/3).

Menurut Harli, beberapa saksi yang sudah diperiksa, di antaranya direksi dari Pertamina. Salah satunya adalah mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Mengenai apakah penyidik akan memeriksa direksi Pertamina lainnya, Harli mengatakan bahwa keputusan tersebut tergantung kebutuhan penyidik.

* Bersambung hal 7 kol 5

Analisis

Ancaman di Bursa Saham

Bagong Suyanto

DI tengah kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, perdagangan di bursa saham dilaporkan sempat dihentikan. Pembekuan perdagangan di bursa saham ini terpaksa dilakukan lantaran mayoritas saham mengalami penurunan hingga 5%. Sejumlah indikator makroekonomi yang cenderung memburuk belakangan ini, langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi psikologis investor.

Seperti diumumkan Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia secara tertulis, bahwa hari Selasa, 18 Maret 2025 lalu telah terjadi pembekuan sementara perdagangan sistem perdagangan di PT BEI pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS) yang dipicu penurunan IHSG yang mencapai 5 persen. Perdagangan bursa saham kembali dilanjutkan pukul 11:49:31 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Trading halt yang dilakukan PT Bursa Efek Indonesia adalah kebijakan bursa untuk menghentikan perdagangan

* Bersambung hal 7 kol 1

Jadwal Imsakiyah	Zuhur	Asar	Maghrib	Isya	Imsak	Subuh
Jumat, 21 Maret 2025	11:49	15:02	17:52	19:01	04:18	04:28

Sumber: Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

BEROMZET RP 1 MILIAR

Sarana Produksi Kosmetik Ilegal Diamankan

JAKARTA (KR) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengamankan sebuah sarana produksi kosmetik ilegal di Tangerang Selatan, Banten, yang memiliki omzet penjualan sekitar Rp 800 juta-Rp 1 miliar, setelah menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan praktik produksi kosmetik ilegal.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (20/3), Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, dari hasil pengawasan, sarana tersebut dinyatakan ilegal karena tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

"Didapati pemilik fasilitas ini berinisial K dan I. Hasil penelusuran di lapangan, Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM juga menemukan barang bukti sejumlah bahan baku obat ilegal yang digunakan dalam produksi, seperti hidrokinon, tretinoin, betametason, deksametason, dan klindamisin," kata Taruna.

KR-Antara/Muhammad Iqbal

Kepala BPOM Taruna Ikrar menunjukkan bahan baku pembuat kosmetik ilegal usai memimpin langsung penggerebekan pabrik kosmetik ilegal di Cireunde, Tangerang Selatan, Banten.

Selain itu, katanya, ditemukan pula produk jadi berupa krim malam dan body lotion sebanyak 5.000 pieces, base cream, bahan kemasan, dan stiker etiket biru. Petugas juga menemukan barang bukti peralatan yang digunakan berupa 2 mixer berkapasitas 1 ton, 7 mixer kecil, 1 cooler showcase, 6 timbangan analitik, dan 1 oven Memmert.

(Ant/San)-d

DAPAT KUCURAN RP 171 TRILIUN

Kejagung Siap Kawal Anggaran BGN

JAKARTA (KR) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap mengawal dan mengawasi pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 171 triliun. Kesepakatan itu terjalin ketika Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Kamis (20/3).

Dadan mengatakan, BGN merupakan badan baru yang diamanahkan untuk mengelola anggaran negara yang cukup besar untuk program MBG. "Sementara kami sudah memiliki APBN 2025 Rp 71 triliun dan kalau permintaan Presiden nanti untuk melayani Rp 82,9 juta dilaksanakan, maka kami akan mendapat tambahan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp 100 triliun, sehingga di tahun 2025 mencapai Rp 171 triliun," terangnya.

Menurutnya, dalam upaya percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pendampingan, arahan, mitigasi dan pengawasan dari Kejagung. Oleh karena itu, BGN meminta pendampingan Kejagung agar program MBG bisa terlaksana sesuai koridor aturan dan bisa segera menyentuh daerah-daerah terpencil. "Kami ada concern waktu untuk mengeksplorasi anggaran yang cukup besar untuk mengimplementasikan APBN. Makanya, sebelum kami lakukan pengadaan itu, kami memohon untuk pendampingan advokasi," ujarnya.

Atas ajakan kerja sama tersebut, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan, Korps Adhyaksa siap mendukung 100 persen dalam berbagai aspek, termasuk legal opinion, legal assistance serta pengawalan dalam proses pelelangan.

(Ant)-d

HENTIKAN PELANGGARAN GENCATAN SENJATA

Liga Arab Desak AS Tekan Israel

KAIRO (KR) - Pertemuan darurat Liga Arab di Kairo Mesir menyerukan Amerika Serikat (AS) untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza. Seruan tersebut disampaikan pada Rabu (19/3) malam waktu setempat dalam resolusi akhir yang dikeluarkan setelah pertemuan para delegasi tetap, yang diadakan untuk membahas dimulainya kembali tindakan genosida Israel di wilayah kantong tersebut sejak Selasa (18/3).

Setidaknya 436 orang tewas dan lebih dari 670 lainnya terluka dalam serangan udara baru Israel di Gaza sejak Selasa, yang menghancurkan perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada Januari.

Resolusi tersebut mendesak AS, sebagai penjamin perjanjian gencatan senjata, untuk memaksa Israel, sebagai kekuatan pendudukan agar menghentikan pelanggaran. Kemudian sepenuhnya melaksanakan semua tahap gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar, dan AS ó serta segera melanjutkan tahap kedua dan ketiga.

Resolusi itu juga menuntut penarikan pasukan Israel dari seluruh wilayah Jalur Gaza, pencabutan pengepungan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan, bantuan darurat, dan medis secara langsung, tanpa syarat, dan dalam jumlah yang cukup tanpa hambatan. Liga Arab juga meminta kepastian distribusi di seluruh wilayah dan memfasilitasi kembalinya warga ke rumah mereka.

(Ant/Has)-d

2.835 POSKO DIDIRIKAN

164.298 Personel Gabungan Amankan Mudik

SURABAYA (KR) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 164.298 personel gabungan dalam rangka Operasi Ketupat 2025 guna memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M.

"Operasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk TNI, Basarnas, BMKG, Dinas Perhubungan, Pramuka, dan sejumlah instansi lainnya," kata Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (20/3).

Sigit menyatakan, pihaknya telah mendirikan 2.835 Posko Pengamanan yang terdiri 1.738 Pos Pengamanan, 788 Pos Pelayanan, dan 309 Pos Terpadu. Pos-pos ini akan difokuskan pada pengamanan 126.736 objek vital, mulai dari masjid, lokasi Salat Idul Fitri, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, hingga objek wisata.

Selain pengamanan, Polri juga telah menyiapkan berbagai skema rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan, khususnya di jalur tol utama dan jalur arteri. **(Ant/San)-f**

KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah

Foto udara Exit Tol Yogyakarta-Solo di Tamanmartani, Kalasan, Sleman, Kamis (20/3/2025). Selama masa mudik Idul Fitri 2025, Jalan Tol Yogyakarta-Solo ruas Prambanan-Tamanmartani sepanjang 6,7 kilometer akan dibuka secara fungsional pada 24 Maret 2025 pukul 06.00-18.00 WIB.

SUNGGUH SUNGGUH TERJADI

● SELASA 4 Maret 2025, hari keempat puasa, jamaah masjid di kampung kami menunggu azan Magrib. Takjil buka puasa juga sudah dibagikan. Ketika mendengar suara azan, seorang anak bergegas mengambil minuman dan siap berbuka puasa. Namun ada yang mengingatkan, "Itu azan untuk wilayah Surabaya Jawa Timur." (Sumarno, Klumutan RT 14 RW 07 Srikayangan, Sentolo Kulonprogo 55664)-f